

MONITOR BERITA

1

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3.1

TAHUN 2007

ANGGOTA DEWAN BERKEBERATAN SUBSIDI LISTRIK NAIK

PLN dianggap tidak terbuka soal
penghitungan efisiensi.

JAKARTA — Sejumlah anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat berkeberatan atas rencana PT PLN meminta tambahan subsidi listrik sebesar Rp 7,2 triliun, dari Rp 25,8 triliun menjadi Rp 33 triliun. Para anggota Dewan tersebut menilai pemasok setrum milik negara ini tidak terbuka dalam penghitungan kinerja keuangan dan efisiensi.

Anggota Komisi Energi, Sony Keraf, menyatakan tidak menyetujui rencana PLN meminta tambahan subsidi listrik tersebut. Subsidi Rp 25,8 triliun itu sudah cukup untuk menutup semua biaya PLN. Bahkan, kata dia, subsidi listrik tersebut cukup untuk memenuhi margin keuntungan PLN. "Mereka sebaiknya efisien. Bila bisa melakukan efisiensi, PLN bisa menekan biaya produksi listrik," katanya kepada *Tempo* di Jakarta kemarin.

PLN, kata dia, tidak terbuka dalam memaparkan kinerjanya. Padahal tahun lalu PLN pernah menyatakan kinerjanya baik dan bisa mendapatkan keuntungan. "Tapi mereka tetap minta subsidi," ujarnya.

Kondisi itu, menurut dia, jadi mencurigakan, sehingga Komisi Energi akhirnya membentuk Panitia Kerja PLN pada Maret lalu untuk meneliti biaya pokok produksi listrik dan dugaan inefisiensi PLN. "Tunggu saja hasil penyelidikannya," katanya.

Rencana PLN meminta tambahan subsidi listrik Rp 7,2 triliun diakui Direktur Utama PLN Eddie Widiono pekan lalu. PLN sudah mengusulkan tambahan subsidi listrik tersebut kepada pemerintah. Direktur Keuangan PLN

Parno Isworo menambahkan, subsidi listrik diusulkan naik karena pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik hingga 2009. PLN mengikuti kebijakan pemerintah tersebut sehingga, mau tidak mau, subsidi listrik harus ditambah (*Koran Tempo*, 16 April).

Anggota Komisi Energi lainnya, Tjatur Sapto Edy, menambahkan, Dewan belum bisa menyetujui rencana PLN meminta tambahan subsidi Rp 7,2 triliun karena harus diputuskan setelah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2007. "Juni nanti," katanya kepada *Tempo* di Jakarta kemarin.

Namun, dia menilai PLN tidak terbuka soal perhitungan keuangan dan efisiensi. Dia pun mempertanyakan subsidi listrik yang membengkak menjadi Rp 33 triliun itu. "Harus dijelaskan dulu angka itu dari mana," ujarnya.

PLN, kata dia, seharusnya bisa lebih dewasa. Apabila ingin mendapatkan margin keuntungan usaha, seharusnya tidak diperoleh dari subsidi pemerintah sebesar Rp 3 triliun. "Tapi dari hasil kerja atau efisiensi," kata Tjatur.

Kemarin Parno Isworo menegaskan PLN hanya menjalankan ketentuan yang ada. Dia menjelaskan penentuan tarif listrik diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Sebaliknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perusahaan-perusahaan negara, termasuk PLN, bisa ditugasi melakukan pelayanan umum. Jika dalam pelayanan umum itu kelayakan umum terganggu, pemerintah harus memberi kompensasi, termasuk margin. "Kami hanya tukang hitung," ujarnya.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR (APR) MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (17) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 22		
TAHUN 2007		

ITS Temukan Bahan Sel Surya dari Buah Mangsi

SURABAYA — Guru besar foto-kimia ITS Surabaya, Prof Dr Syafsr Akhlus MSc, menemukan sel surya dari bahan alam, yakni buah mangsi (buah tinta). "Saya sedang memulai uji coba membuat sel surya dengan pelapis di antara dua kaca ditempel dengan oksida timah (SnO2), TiO2 (titanium oksida), zat warna dari buah mangsi, dan elektrolit," ujarnya, Senin (16/4).

Dosen Jurusan Kimia FMIPA ITS Surabaya yang akan dikukuhkan sebagai guru besar pada 18 April

mendatang itu, menjelaskan, pihaknya mengembangkan sel surya dari bahan alam, karena mahalnya bahan sel surya dari bahan silikon. "Upaya yang saya lakukan cukup menjanjikan, karena teknologinya cukup mudah dan harganya jauh lebih murah dibanding sel surya berbahan silikon," paparnya.

Apalagi, Indonesia memiliki bahan zat berwarna dari berbagai bahan alam yang melimpah. "Saya yakin jika uji coba yang saya lakukan berhasil, maka kesulitan untuk

mengembangkan sel surya akibat mahalnya harga akan teratasi."

Dia menjelaskan, zat warna atau pewarna dapat memperlakukan energi sebagai rekatan atau produk dari suatu reaksi fotokimia. "Bila suatu molekul mengabsorpsi foton (cahaya), maka elektron dalam keadaan dasar dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi (tereksitasi), tergantung seberapa besar energi diserap."

Dia menuturkan, elektron yang berada pada keadaan tereksitasi

singlet akan cenderung kembali ke keadaan dasar, bila stimulus energi yang diberikan tidak ada lagi. "Kembalinya elektron ke keadaan dasar itu dapat melalui beberapa cara, di antaranya melalui penyilangan antar sistem ke keadaan triplet dahulu. Kemudian, memberikan emisi foton dan turun ke keadaan dasar. Proses itu dikenal sebagai fosforisensi," tukasnya. Cara lain, katanya, dengan menjalani proses-fluorisensi. ■ ant

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

PLN Disjaya Raih Pendapatan Rp 6,4 T

JAKARTA - PT PLN Disjaya hingga awal April 2007 mampu membukukan pendapatan Rp 6,4 triliun atau sekitar 35% dari target pendapatan tahun ini sebesar Rp 18,3 triliun. Karena itu, hingga akhir 2007 perseroan optimistis target tersebut akan terlampaui. *General Manager* PLN Disjaya Fahmi Mochtar di Jakarta, akhir pekan lalu, mengharapkan, keuntungan yang terjadi pada 2006 bisa terulang pada tahun ini. Tahun lalu, PLN Disjaya menargetkan pendapatan Rp 16,7 triliun, namun perseroan mampu membukukan pendapatan Rp 17,6 triliun, sehingga untung Rp 1 triliun. Untuk mendukung pencapaian target pendapatan usaha, PLN Disjaya terus meminimalisasi pencurian listrik. Tahun ini PLN Disjaya mendapatkan 130 ribu pelanggan baru atau menjadi 3,38 juta pelanggan pada akhir 2007. (ari)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR **APR** MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

Karaha Bodas ekonomis capai 50 MW

JAKARTA: PT Pertamina berharap potensi cadangan terbukti untuk proyek PLTP Karaha Bodas mencapai 50 MW agar proyek tersebut dapat dikembangkan secara ekonomis.

"Pertamina saat ini sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan proyek tersebut. Untuk memastikan jumlah potensi cadangan harus terlebih dahulu dilakukan pembuktian melakukan eksplorasi lanjutan," ujar Kepala Divisi Komunikasi Pertamina Toharso dalam penjelasan resmi yang kepada *Bisnis*, kemarin.

Sebelumnya, Direktur Hulu PT Pertamina Sukusen Soemarinda mengungkapkan perusahaan menganggarkan US\$40 juta untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Karaha Bodas dalam rencana kerja anggaran perusahaan 2008 menyusul tuntasnya sengketa hukum dengan Karaha Bodas Company (KBC).

Dia menegaskan tahun depan pihaknya harus memulai pengembangan PLTP Karaha Bodas agar tidak diambil alih pemerintah setelah 2010.

Karena itu, kata dia, perusahaan akan memasukkan anggaran pengembangan PLTP Karaha Bodas dalam anggaran 2008 karena anggaran tahun ini sudah tidak mungkin lagi diubah. (*BISNIS/BDD*)

6

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : B 2

TAHUN 2007

Menteri BUMN Akan Konsultasikan Kasus Borang

Wewenang perganti-
an anggota direksi
PLN ada di tangan
Menteri BUMN.

JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung terkait dengan keluarnya surat perintah penuntutan/penyelesaian perkara korupsi dan penipuan Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap Borang di Palembang. Konsultasi menyangkut penetapan status Direktur Utama PT PLN (Persero) Eddie Widiono sebagai tersangka.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiarto mengatakan konsultasi akan dilakukan dengan Jaksa Agung. "Sesama pejabat setingkat menteri, konsultasi seperti itu bisa saja," ujarnya kepada *Tempo* akhir pekan lalu.

Berdasarkan informasi yang diterima *Tempo*, Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan surat perintah penunjukan dua jaksa untuk melakukan penuntutan/penyelesaian perkara tindak pidana kasus korupsi



si dan penipuan pembangkit Borang (*Koran Tempo*, 13 April). Tersangka dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 112 miliar tersebut adalah Eddie Widiono.

Surat perintah itu ditandatangani Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Zulkarnain. Surat tersebut memerintahkan jaksa penuntut melaksanakan, antara lain, penahanan dan meneliti benda sitaan/barang bukti, peme-

riksaan tambahan, penghentian penuntutan, serta penuntutan perkara ke pengadilan.

Rabu pekan lalu, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengekspos kasus-kasus korupsi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam ekspos tersebut, tim yang diketuai Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji menjelaskan ka-

sus-kasus korupsi yang ditanganinya, di antaranya kasus korupsi pembangkit listrik Borang dan penjualan kapal tanker super Pertamina.

Selain itu, KPK akan melakukan supervisi penanganan kasus dugaan korupsi pembangkit Borang. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi S.P, pihaknya memberikan masukan kepada Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pembangkit Borang. "Selain itu, KPK akan melakukan supervisi kasus tersebut," ujarnya kepada *Tempo* pekan lalu.

Sugiharto menyatakan, hingga kini, pihaknya belum mendapatkan laporan mengenai surat perintah penuntutan tersebut. "Saya harus lihat (surat tersebut) dulu, jadi *I have no comment*," ujarnya.

Sedangkan Deputy Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi Roes Aryawijaya mengatakan, hingga kini, belum dibahas rencana pergantian jajaran direksi PLN terkait dengan penetapan tersangka kepada Direktur Utama PLN. "Yang pasti itu wewenang (pencopotan Eddie Widiono) Pak Menteri (Sugiharto)," ujarnya.

● WAHYUDIN FAHMI | ALI NUR YASIN

Korupsi Borang

- PLN menunjuk langsung PT Guna Cipta Mandiri sebagai kontraktor pengadaan PLTG Borang bergerak 2 x 22,8 megawatt, Juli 2004.
- April 2005, Badan Pemeriksa Keuangan menilai pembangkit US\$ 29,5 juta itu terlalu mahal US\$ 11,6 juta.
- Januari 2006, polisi menahan Direktur Pembangkitan PLN Ali Herman Ibrahim.
- April 2006, Direktur Utama PLN Eddie Widiono menjadi tersangka dan ditahan.
- 20 Juli 2006, Kepolisian melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Borang ke Kejaksaan Agung.
- 2 Agustus 2006, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas Eddie Widiono dengan alasan belum lengkap.
- 15 Agustus 2006, Kepolisian menyerahkan berkas Eddie Widiono ke Kejaksaan.
- 25 Agustus 2006, Kejaksaan mengembalikan berkas ke kepolisian.
- 31 Agustus 2006, Eddie Widiono dibebaskan dari tahanan.
- 10 Januari 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung menggelar kasus Borang.
- 22 Maret 2007, Berkas Eddie Widiono diserahkan ke Kejaksaan dan penyidik menyatakan lengkap.
- 14 April 2007, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengekspos kasus-kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus yang dibahas antara lain korupsi pembangkit Borang. ● ALI NUR YASIN

MONITOR BERITA

<p><input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA</p>	<p><input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/></p>										
<p>KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM</p>											
<p>JAN FEB MAR <u>APR</u> MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES</p>											
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <u>17</u> 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p>											
<p>HALAMAN : 4</p>										<p>TAHUN 2007</p>	

Warga Kab. Bandung Tolak Rencana PLTS

BANDUNG, (PR).-

Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS) di Kel. Mekarmulya Kec. Gedebage Kota Bandung, kembali menuai protes warga. Kali ini, yang memprotes ialah warga Kabupaten Bandung, tepatnya dari Kampung Babakan Sayang dan Cipanileuman Desa Cibiru Hilir Kec. Cileunyi.

Dua kampung yang berpenduduk sekitar 700 orang itu, terletak sekitar 100-200 meter dari lokasi yang bakal dijadikan PLTS. Penolakan itu mereka wujudkan dalam bentuk aksi massa dan pembacaan deklarasi, Senin (16/4).

Aksi massa dimulai sekitar pukul 9.00 WIB. Sebelumnya, warga sempat mengundang sejumlah pejabat Pemerintah Kota dan Kab. Bandung, serta anggota DPR RI agar menghadiri acara tersebut. Namun, tidak ada satu pun yang datang.

Menurut Ma'soem Junae-di, Ketua RW VI Kampung Cipanileuman, Pemkot Kota Bandung seakan menutup mata tentang keberadaan warga Kab. Bandung di dekat lokasi pembangunan sampah. "Mereka sepertinya menganggap kita tidak ada.

Buktinya, kita tidak pernah diajak bicara atau diberi penjelasan tentang keberadaan pabrik itu," ujarnya.

Aksi mereka juga untuk membantah pernyataan pihak ITB, bahwa di dekat lokasi PLTS itu hanya ada sedikit rumah. "Di Desa Cibiru Hilir ada RW 5 dan RW 6 dengan jumlah rumah cukup banyak," ujar Endang, warga Kp. Babakan Sayang.

Ia juga menyatakan penolakannya. "Kita tidak akan pernah setuju dengan adanya pabrik sampah itu. Selain tidak ada sosialisasi, Pemkot Bandung juga tidak pernah minta izin ke warga," katanya.

Warga sepakat tidak akan menggadaikan hidup dan kesejahteraan keluarganya hanya untuk uang kompensasi. "Kalau pemkot masih nekat, kita akan menutup saluran air sungai. Soalnya, sungai itu melintas ke kampung. Kalau tidak, nanti kampung kami tercemar limbah sampah," ujar Endang.

Warga juga meminta pejabat Pemkab Bandung serta Gubernur Jabar membela warga. "Harusnya Pemkab Bandung peduli sama warganya. Selama ini malah diam saja. Begitu juga dengan Pak Gubernur," tutur Endang pula. (A-128)***

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2007

Listrik di Selatan Belum Memadai

CIANJUR, (PR).-

Distribusi listrik kepada pelanggan di beberapa daerah wilayah selatan Kab. Cianjur, belum bisa dipenuhi sesuai standar. Banyak faktor menjadi kendala, seperti gangguan alam, tegangan rendah karena jaraknya jauh dari gardu induk. Kondisi itu diperparah pula dengan kasus pencurian listrik sehingga tegangan listrik sering *drop*.

"Kami selalu berupaya memberikan pelayanan secara maksimal. Tapi kondisi saat ini memang belum bisa optimal sesuai standar, seperti layanan di daerah utara dan tengah Cianjur. Soalnya banyak kendala yang sulit dihindari, seperti kondisi alam," kata Kepala UPJ PLN Tanggeung Kab. Cianjur Sujasmani mendampingi Humas APJ PLN Cianjur Bunyasin, Sabtu (14/4). Keduanya menanggapi pertanyaan seputar banyaknya gangguan

terhadap distribusi listrik ke pelanggan di wilayah selatan Kab. Cianjur.

Dikatakan, saat ini tegangan listrik *drop* di wilayah selatan masih sulit dihindari. Pasalnya lokasi pelanggan di wilayah selatan cukup jauh dengan gardu induk, jaraknya lebih dari 100 km. Sehingga tegangan listrik menjadi rendah, khususnya ketika memasuki sore hari. "Upaya sudah kami lakukan, seperti memasok aliran listrik dari wilayah Sukabumi dan Kab. Cianjur. Tapi tetap saja, tegangan *drop* ini sulit dihindari. Selain itu diperparah pula dengan banyak temuan kasus pencurian listrik sehingga menambah beban tegangan," ujar Sujasmani.

Dikatakan Sujasmani, faktor alam seperti bencana alam longsor, sambaran petir dan angin, sering kali melanda wilayah selatan Cianjur. Kondisi itu membuat gangguan aliran

listrik berupa mati mendadak sulit diatasi pula. Salah satu contohnya, aliran listrik ke rumah warga di beberapa daerah, sempat mati sekitar tiga hari. Penyebabnya karena ada dua tiang di jaringan distribusi SKM yang ambruk longsor di Kampung/Desa Sukamanah Kec. Leles dan trafo distribusi TIS di Kp. Citiis rusak akibat tersambar petir.

Dijelaskan, dua lokasi penyebab gangguan itu sulit dijangkau. Sehingga pencarian sumber gangguan membutuhkan waktu. Perbaikan pun baru bisa dilakukan dua hari kemudian dan aliran listrik bisa menyala lagi, keesokan harinya. "Lokasi kerusakan itu sulit dijangkau, jadi proses pencarian dan perbaikan hingga bisa normal, lamanya tiga hari. Waktu itu, kami juga menyampaikan pengumuman kepada warga setelah kejadian," ujarnya. (A-116)***

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR **APR** MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

PLTU Suralaya Terganjil Amdal

JAKARTA – Pengembangan proyek PLTU batu bara Suralaya berkapasitas 600 MW di Cilegon, Banten sedikit terhambat. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Banten hingga kini belum menerbitkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek tersebut.

“Seharusnya sekarang pembangunan sudah dimulai, tapi Gubernur Banten Atut Chosiyah berjanji memberi izin amdal proyek PLTU Suralaya,” ujar Direktur Pengembangan dan Niaga PT Indonesia Power Bambang Isti Eddy di sela *Indonesian Coalaboration 2007* di Jakarta, Senin (16/4).

Bambang menegaskan, Gubernur Banten meminta Indonesia Power untuk mengajukan amdal baru pada proyek PLTU berdaya 2x600 MW tersebut. Karena harus mengurus amdal baru, pembangunan pembangkit tersebut belum bisa dilakukan hingga kini.

Dia berharap dalam tempo satu hingga dua bulan Pemprov Banten bisa menyelesaikan amdal proyek tersebut. “Kalau bisa jangan lama-lama, kalau nanti kontraktor Cina sudah datang, kami yang akan menanggung rugi,” ujarnya.

Bambang mengaku, pihaknya belum menghitung potensi kerugian karena proses ini. Meski begitu, lanjut dia, ini menjadi tantangan untuk

mempercepat pembangunan agar tetap bisa selesai tepat waktu, yaitu target operasi 2009.

Proyek pembangunan PLTU 600 MW merupakan bagian dari proyek percepatan 10.000 MW yang ditandatangani di Subang, Jawa Barat, 21 Maret 2007. PLTU Suralaya (1x600 MW) akan dibangun Konsorsium China National Technical Import & Export Corp (CNTIC)-Zhejiang Electric Power Design Institute-PT Rekayasa Industri sebagai pemenang tender. Panitia tender PLN memenangkan CNTIC, karena dinilai paling memenuhi syarat dilihat dari harga penawaran terendah, *performance*, dan kemampuan finansial dibandingkan penawar lainnya yang diumumkan di Jakarta, 8 Desember 2006.

CNTIC memberikan harga penawaran pembangkitan Rp 378,26 atau US\$ 4,124 sen per kwh, dengan kemampuan menghasilkan daya kotor (*gross out put*) 625 MW. Konsorsium CNTIC menjadi penawar terendah tender PLTU Banten 1 (Suralaya) dengan nilai proyek US\$ 473,736 juta.

PLTU Suralaya adalah salah satu unit bisnis pembangkitan yang dimiliki PT Indonesia Power, anak usaha PT PLN (persero). Unit Pembangkitan Suralaya adalah Unit Bisnis Pembangkitan terbesar di Indonesia yang berada di desa Suralaya, Merak, Kota Cilegon, Banten, atau sekitar 7 km arah utara Pelabuhan Penyberangan Merak. Unit Bisnis Pembangkitan Suralaya menangani tujuh unit PLTU dengan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. (c94)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 14		TAHUN 2007

Indonesia Power to require additional 14m tons of coal by 2010

Ika Krismantari
The Jakarta Post/Jakarta

Indonesia Power (IP), a subsidiary of state-owned electricity utility PLN, said Monday it would need an additional 14 million tons per year of low-rank coal by 2010 in order to fire its new coal power plants in Java.

The new plants will have a combined capacity of 3,900 megawatts (MW).

As part of the government's crash program to secure additional power supply of 10,000

MW from PLN by the end of 2010, PLN has given a mandate to IP to develop new power plants in Suralaya, Banten (with a total capacity of 600 MW), Labuan, East Java (600 MW), Teluk Naga, West Java (900 MW), northern West Java (900 MW) and southern West Java (900 MW).

Indonesia Power's development and commercial director Bambang Isti Eddy said Monday on the sidelines of a coal-industry seminar in Jakarta that these power plants had been designed to use low-rank

coal with calorific levels of less than 5,000 per gram burned and a moisture content of up to 30 percent.

Currently, the company requires 11 million tons of high and low-rank coal per year to fire its existing power plants at Suralaya — the largest coal-fired power plants in Java with a total capacity of 3,400 MW.

The company sources five to six million of high-rank coal per year from the country's second biggest coal producer, PT Bukit Asam Batubara, while its

low-rank coal requirements are supplied by other local companies, including Adaro, Kideko and Berau Coal.

Bambang said that he hoped that the local coal industry would be able to meet rapidly increasing coal requirements, which are expected to rise by 70 million tons when the new power plants being built under the fast-track program come onstream.

"By 2010, IP alone will need a total additional supply of 25 million tons per year, of which only nine to ten million will be

high-rank coal, with the rest being low-rank coal," Bambang said.

Of Indonesia's total of 6.7 billion tons in coal reserves, 70 percent consist of low-rank coal.

The government has encouraged the construction of coal-fired power plants that use low-energy coal, which is cheaper than other grades, to meet growing electricity demand and reduce the use of expensive oil-based fuels.

Under the government plan, PLN and private power pro-

ducers are expected to increase coal-fired capacity by 20,000 MW by 2010.

To encourage increased production of low-rank coal, the government is considering providing incentives to mining firms producing low-rank coal with calorific levels of below 4,200 per gram.

The planned incentives will likely take the form of cuts in royalty and other payments, such as reducing mandatory payments to the coal development fund to 7.5 percent of total sales from 13.5 percent

at present.

Incentives could also be provided to producers of low-rank coal with calorific levels of between 4,600 and 5,100 per gram so that the mining firms would only have to pay 9 percent of their total revenues to the state.

Indriatmoko, the head of minerals and coal planning at the Energy and Mineral Resources Ministry, who also attended the seminar, said the regulations on incentives had been proposed to the Finance Ministry for approval.